

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Studi hubungan internasional (HI) telah lama membahas bagaimana perdagangan global menjadi alat bagi negara-negara untuk memperluas pengaruhnya dan mencapai kepentingan nasional. Perdagangan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pertukaran ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi, kekuatan politik, dan bahkan strategi pertahanan. Sejak ditandatanganinya Perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944, sistem ekonomi internasional mulai mengalami perubahan besar dengan diperkenalkannya perdagangan bebas sebagai pilar utama dalam perekonomian global. Perjanjian ini melahirkan institusi-institusi seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia, yang bertugas menjaga stabilitas ekonomi global dan mengurangi hambatan perdagangan. Kemudian, *World Trade Organization* (WTO) dibentuk pada tahun 1995 untuk mengatur perdagangan antarnegara dengan prinsip-prinsip yang lebih modern dan terstruktur.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, sistem perdagangan global yang awalnya berorientasi pada ekonomi mulai dipolitisasi, terutama dalam konteks persaingan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Alih-alih hanya berfokus pada efisiensi ekonomi dan keuntungan komparatif, negara-negara mulai menggunakan kebijakan perdagangan sebagai instrumen politik untuk mempertahankan dominasinya di kancah global. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya proteksionisme, kebijakan tarif yang agresif, serta pembatasan ekspor teknologi strategis yang diterapkan oleh negara-negara besar (Krugman & Obstfeld, 2020).

Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antarnegara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat hubungan antarnegara. Dalam sistem ekonomi global, perdagangan internasional menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, serta integrasi pasar dunia (Gunawan & Arfah, 2020). Peran perdagangan internasional sangat

signifikan dalam membentuk dinamika hubungan antarnegara. Selain sebagai sarana pertumbuhan ekonomi, perdagangan juga menjadi alat diplomasi dan strategi geopolitik. Negara-negara menggunakan kebijakan perdagangan, seperti tarif, kuota, dan sanksi ekonomi, untuk melindungi industri domestik dan mempertahankan kepentingan nasional (Gunawan & Arfah, 2020).

Dalam konteks perang dagang AS–Tiongkok, perdagangan internasional tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga menjadi instrumen kekuatan politik. Pembatasan ekspor teknologi dan sanksi terhadap Huawei oleh AS menunjukkan bagaimana perdagangan digunakan untuk membatasi dominasi teknologi negara pesaing. Kebijakan ini memengaruhi rantai pasok global, hubungan diplomatik, serta keseimbangan kekuatan ekonomi dunia. Oleh karena itu, perdagangan internasional dalam studi ini akan dikaji sebagai elemen strategis dalam persaingan global, yang tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi tetapi juga stabilitas politik dan keamanan internasional (Gunawan & Arfah, 2020).

Pemilihan judul “Dampak perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok Studi Kasus Huawei Periode 2020-2024” didasarkan pada relevansi konflik ekonomi ini dalam studi hubungan internasional dan ekonomi global. Perang dagang AS-Tiongkok bukan sekadar persaingan ekonomi, tetapi juga mencerminkan strategi geopolitik dalam mempertahankan dominasi teknologi dan perdagangan. Huawei menjadi simbol dalam konflik ini karena perannya sebagai pemimpin industri 5G dan teknologi semikonduktor. Sanksi AS terhadap Huawei, termasuk pembatasan akses terhadap teknologi mutakhir, menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi digunakan sebagai alat politik dalam persaingan global.

Konflik ini berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi global, mulai dari gangguan rantai pasok teknologi, polarisasi pasar, hingga munculnya potensi blok perdagangan baru. Dengan meneliti kasus Huawei, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan perdagangan memengaruhi stabilitas ekonomi dunia dan bagaimana negara-negara serta perusahaan global merespons dinamika yang terus berkembang. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Bown, C. P. (2020) dalam jurnal *The 2018-2019 Trade War and the Future of*

*the Global Trading System*, penulis menemukan bahwa penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kebijakan tarif dan sanksi perdagangan, tetapi kurang menyoroti dampak spesifik terhadap industri teknologi dan rantai pasok global. Dalam konteks perang dagang AS-Tiongkok, salah satu aspek yang paling terkena dampaknya adalah sektor teknologi, terutama perusahaan seperti Huawei, yang menghadapi pembatasan ekspor dan pemutusan akses terhadap teknologi penting seperti semikonduktor buatan AS.

Hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah berkembang pesat sejak 1979, ketika kedua negara secara resmi menjalin hubungan diplomatik dan menandatangani Perjanjian Perdagangan AS–Tiongkok. Sejak saat itu, perdagangan bilateral mengalami pertumbuhan signifikan, menjadikan Tiongkok sebagai mitra dagang utama bagi AS. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan ini mengalami ketegangan akibat kebijakan proteksionisme dan persaingan strategis di sektor teknologi. Salah satu titik balik penting dalam ketegangan tersebut adalah kebijakan sanksi yang diberlakukan terhadap Huawei oleh pemerintahan AS sejak 2019. Huawei, sebagai perusahaan teknologi terbesar asal Tiongkok, menjadi sasaran utama karena posisinya yang dominan dalam pengembangan teknologi 5G dan ekosistem digital global (Mirrlees, 2024). Kebijakan ini berdampak besar terhadap operasional global Huawei, mengganggu aksesnya terhadap teknologi penting, serta memaksa perusahaan untuk melakukan restrukturisasi strategi bisnisnya di berbagai kawasan.

Ketegangan antara AS dan Huawei turut menciptakan tekanan terhadap negara-negara lain yang bergantung pada layanan dan infrastruktur Huawei, khususnya dalam pengembangan jaringan digital dan sistem telekomunikasi. Beberapa negara menghadapi dilema geopolitik dalam menentukan apakah akan tetap menggunakan teknologi Huawei atau mengikuti desakan AS untuk membatasi keterlibatan perusahaan tersebut. Penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut bagaimana sanksi terhadap Huawei secara langsung memengaruhi posisi perusahaan ini dalam pasar global, serta bagaimana negara-negara lain menavigasi tekanan politik dan ekonomi yang muncul dari dinamika ini (Moore, 2023).

Ilmu Hubungan Internasional (HI) memiliki peran penting dalam memahami bagaimana interaksi antara negara-negara dapat menciptakan stabilitas maupun ketegangan dalam sistem internasional. Salah satu tujuan utama dari disiplin ini adalah menganalisis dinamika kekuatan global, termasuk dalam aspek ekonomi, politik, dan keamanan. Dalam konteks sanksi terhadap Huawei, studi HI memberikan kerangka yang kuat untuk memahami bagaimana kebijakan ekonomi—dalam hal ini sanksi dan pembatasan ekspor teknologi—digunakan sebagai alat politik dalam persaingan antara dua kekuatan global, serta bagaimana dampaknya terhadap struktur kekuatan teknologi internasional yang semakin terintegrasi (Stango, 2024).

Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator pasar, tetapi juga sebagai aktor strategis yang menggunakan kebijakan ekonomi untuk mencapai kepentingan nasionalnya, baik dalam aspek politik, keamanan, maupun dominasi teknologi. Dalam konteks Huawei, kebijakan proteksionisme Amerika Serikat ditunjukkan melalui langkah konkret seperti memasukkan Huawei ke dalam *Entity List*, membatasi akses terhadap teknologi berbasis AS, serta menekan sekutu-sekutu strategis untuk tidak bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Tujuan utamanya adalah membatasi ekspansi Huawei di pasar global dan mempertahankan dominasi AS dalam sektor teknologi tinggi (Kennedy, 2018). Sebaliknya, Tiongkok tidak hanya bertindak sebagai pihak yang terkena dampak, tetapi juga mengembangkan strategi balasan melalui peningkatan kemandirian teknologi nasional dan perluasan jaringan kerja sama internasional yang tidak bergantung pada teknologi AS. Huawei, sebagai simbol kemandirian teknologi Tiongkok, didorong untuk memperkuat ekosistem internalnya dan mengembangkan alternatif terhadap komponen luar negeri, termasuk sistem operasi dan cip buatan sendiri (Mukti, 2023).

Dalam perspektif hubungan internasional, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi suatu negara sering kali tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga pada strategi geopolitik dan keamanan nasional. Dalam kasus Huawei, kebijakan ekonomi seperti sanksi dan pembatasan akses teknologi yang diterapkan oleh Amerika Serikat mencerminkan upaya strategis untuk menghambat kebangkitan

teknologi Tiongkok. Negara-negara besar menggunakan instrumen perdagangan sebagai alat diplomasi ekonomi dan tekanan politik yang dapat berdampak luas terhadap struktur kekuatan internasional (Mirrlees, 2024).

Dinamika Kekuatan Ekonomi dalam Hubungan Internasional Perang dagang AS–Tiongkok, dengan Huawei sebagai salah satu aktor utama yang terdampak, mencerminkan pergeseran keseimbangan kekuatan ekonomi dunia. Amerika Serikat, sebagai pemimpin lama dalam industri teknologi global, memandang pertumbuhan pesat Huawei sebagai ancaman terhadap dominasinya di sektor komunikasi dan infrastruktur digital. Sebagai respons, AS tidak hanya membatasi akses Huawei terhadap teknologi penting seperti cip dan sistem operasi, tetapi juga melobi sekutu-sekutunya untuk mengecualikan teknologi Huawei dari pengembangan jaringan 5G mereka. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa dalam hubungan internasional, kompetisi ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aspek politik dan keamanan strategis (Stango, 2024).

Di sisi lain, Tiongkok merespons tekanan tersebut dengan mendorong kemandirian teknologi Huawei melalui peningkatan investasi di bidang riset dan pengembangan, termasuk pengembangan cip buatan sendiri dan sistem operasi alternatif. Selain itu, Huawei memperluas jangkauan pasarnya ke negara-negara berkembang yang tidak terikat pada aliansi keamanan Barat, sejalan dengan strategi kerja sama global Tiongkok melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI). Hal ini menunjukkan bagaimana perusahaan seperti Huawei dijadikan alat diplomasi ekonomi dan sarana untuk memperkuat pengaruh Tiongkok di tingkat internasional (Jones & Zeng, 2019).

Dampak Konflik Ekonomi terhadap Negara Lain, Meskipun Huawei adalah aktor utama yang terkena sanksi, dampaknya meluas ke berbagai negara yang selama ini menjadi pengguna atau mitra teknologi perusahaan tersebut. Negara-negara seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan menghadapi dilema strategis dalam menentukan kebijakan penggunaan teknologi Huawei, di tengah tekanan dari Amerika Serikat dan kebutuhan untuk menjaga hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Ketegangan ini menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi teknologi dan strategi

pembangunan infrastruktur digital. Bahkan beberapa negara berkembang menghadapi risiko terhambatnya pembangunan jaringan komunikasi karena ketergantungan terhadap teknologi Huawei yang terputus pasokannya akibat sanksi (Moore, 2023).

Sebagai contoh, Indonesia yang memiliki hubungan dagang erat dengan Tiongkok juga terkena dampak dari kebijakan AS yang membatasi akses Huawei terhadap teknologi. Beberapa sektor industri yang menggunakan produk dan layanan Huawei, seperti telekomunikasi dan jaringan infrastruktur digital, menghadapi ketidakpastian dalam kelanjutan proyek-proyek yang melibatkan perusahaan tersebut. Selain itu, sanksi terhadap Huawei menciptakan polarisasi pasar, di mana negara-negara dipaksa untuk memilih antara melanjutkan kerja sama teknologi dengan Huawei atau mengikuti tekanan dari Amerika Serikat untuk menolak teknologi asal Tiongkok. Hal ini dapat berdampak pada kestabilan hubungan diplomatik dan ekonomi global, terutama bagi negara-negara yang berusaha menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak (Moore, 2023).

Dalam perspektif HI, dampak ini menunjukkan bahwa perang dagang bukan sekadar persoalan ekonomi bilateral, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap tatanan dunia secara keseluruhan. Sanksi terhadap Huawei telah menjelma menjadi simbol konflik strategis yang lebih besar antara dua kekuatan global, di mana negara-negara berkembang, khususnya di Asia Tenggara, perlu menavigasi ketegangan ini dengan menyeimbangkan hubungan dengan kedua negara, menjaga stabilitas ekonomi domestik, serta mencari strategi adaptasi dalam menghadapi dinamika penggunaan teknologi dan kerja sama digital yang semakin terfragmentasi (Acharya, 2018).

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan salah satu konflik ekonomi terbesar di abad ke-21 yang mencerminkan persaingan strategis antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia. Konflik ini tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga memberikan efek domino terhadap stabilitas ekonomi global, terutama dalam sektor teknologi yang semakin menjadi pusat persaingan geopolitik. Salah satu aspek paling krusial dalam perang dagang ini adalah kebijakan sanksi Amerika Serikat terhadap Huawei,



yang bertujuan untuk membatasi pertumbuhan dan ekspansi global perusahaan tersebut sebagai representasi dominasi teknologi Tiongkok (Segal, 2020). Sanksi ini tidak hanya menargetkan operasional Huawei di Amerika Serikat, tetapi juga memengaruhi kemitraan internasionalnya, menghambat akses ke komponen penting, dan memperumit kerja sama dengan negara-negara mitra (Bown, 2020).

Sejak awal perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kedua negara tidak hanya terlibat dalam kompetisi ekonomi, tetapi juga dalam persaingan geopolitik yang semakin tajam. AS, sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar, berusaha untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin teknologi global, sedangkan Tiongkok, melalui kebijakan Made in China, berusaha mengurangi ketergantungan terhadap teknologi Barat dan memperkuat kemandirian teknologinya. Dalam konteks ini, Huawei menjadi simbol utama ambisi Tiongkok di bidang teknologi tinggi. Persaingan antara kedua negara yang tercermin dalam penanganan terhadap Huawei tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi kedua pihak, tetapi juga dapat menciptakan blok-blok teknologi baru di tingkat global. Oleh karena itu, kebijakan terhadap Huawei berpotensi menciptakan polarisasi pasar global, di mana negara-negara terpaksa memilih antara teknologi dari AS atau Tiongkok sebagai bagian dari infrastruktur digital mereka.

Huawei, sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, telah menjadi simbol kebangkitan industri teknologi tinggi Tiongkok. Perusahaan ini memainkan peran sentral dalam pengembangan jaringan 5G, perangkat telekomunikasi, dan inovasi teknologi strategis lainnya. Namun, dalam konteks perang dagang, Huawei dipandang sebagai ancaman terhadap dominasi teknologi Amerika Serikat, terutama dalam industri jaringan komunikasi global. Upaya Amerika Serikat untuk membatasi pengaruh Huawei mencerminkan persaingan strategis yang lebih luas dalam ranah teknologi global, sekaligus memicu dilema bagi negara-negara lain dalam memilih mitra teknologinya (Moore, 2023). Oleh karena itu, pemerintah AS menerapkan berbagai sanksi, termasuk pembatasan akses Huawei terhadap teknologi canggih yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Amerika maupun

mitra-mitranya seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) (Clarke, M., 2021).

Pembatasan akses terhadap Huawei yang diberlakukan oleh Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada perusahaan tersebut, tetapi juga pada industri global yang menggunakan produk dan teknologi Huawei sebagai bagian dari ekosistem digital mereka. Banyak perusahaan di berbagai negara, termasuk mitra dagang utama AS dan Tiongkok seperti Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, dan Indonesia, mengalami ketidakpastian dalam kelangsungan kerja sama teknologinya dengan Huawei. Misalnya, sektor telekomunikasi di Asia Tenggara, yang sebelumnya menjalin kemitraan dengan Huawei dalam pengembangan jaringan 4G dan 5G, menghadapi gangguan dalam proses pembangunan dan integrasi teknologi digital, akibat pembatasan yang menghambat ketersediaan perangkat dan dukungan teknis yang stabil (Jones & Zeng, 2019).

Perang dagang ini bukan hanya merupakan konflik ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas. Kebijakan sanksi AS terhadap Huawei mencerminkan upaya untuk mempertahankan hegemoni dalam sektor teknologi dan membatasi ekspansi Tiongkok melalui perusahaan teknologi andalannya di pasar global (Friedberg, A. L., 2022). Sebagai respons, Tiongkok mengadopsi strategi diversifikasi dan mempercepat program Made in China, dengan menempatkan Huawei sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kemandirian di industri teknologi tinggi dan mengurangi ketergantungan terhadap komponen teknologi dari negara-negara Barat (Kennedy, S., 2018).

Dampak dari sanksi terhadap Huawei juga menciptakan polarisasi dalam sistem perdagangan global, di mana negara-negara dipaksa untuk memilih antara tetap menjalin kerja sama dengan Huawei atau mengikuti tekanan Amerika Serikat untuk menghentikan penggunaan teknologi perusahaan tersebut. Hal ini berpotensi mengarah pada fragmentasi ekonomi global dan membentuk blok perdagangan berbasis teknologi yang lebih tertutup, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas ekonomi dunia (Acharya, A., 2018). Negara-negara berkembang, khususnya di Asia Tenggara, menghadapi



tantangan besar dalam menavigasi ketegangan ini. Di satu sisi, mereka memiliki ketergantungan pada teknologi dan infrastruktur digital Huawei, sementara di sisi lain, mereka juga harus menjaga hubungan strategis dengan AS sebagai mitra pertahanan dan ekonomi (Mearsheimer, J. J., 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sanksi AS terhadap Huawei dalam konteks perang dagang AS–Tiongkok terhadap stabilitas ekonomi global selama periode 2020–2024. Studi ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi posisi Huawei dalam rantai pasok global, dinamika kerja sama internasional, serta strategi adaptasi negara-negara lain dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang menyertai pembatasan teknologi ini. Dengan memahami dinamika tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana kebijakan ekonomi digunakan sebagai alat geopolitik dan bagaimana dampaknya terhadap tatanan ekonomi dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan yang signifikan karena mengangkat isu strategis yang masih berkembang dan memiliki implikasi luas terhadap struktur kerja sama teknologi global, yaitu dampak sistemik dari sanksi Amerika Serikat terhadap Huawei. Sebagian besar kajian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis tarif dan dampaknya terhadap sektor-sektor dalam negeri seperti pertanian atau manufaktur. Namun, penelitian ini menghadirkan perspektif yang berbeda dengan menelaah bagaimana kebijakan terhadap satu perusahaan teknologi dapat memicu fragmentasi ekosistem digital global, pembentukan blok-blok teknologi baru, serta pergeseran arah investasi dan aliansi teknologi internasional. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini bersifat multidisipliner, memadukan kerangka ekonomi politik internasional, geopolitik, dan analisis kebijakan teknologi. Fokus temporal pada fase pasca-eskalasi di periode 2020–2024 juga memberikan relevansi aktual terhadap dinamika kebijakan dan respons strategis kedua negara terhadap Huawei. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai hubungan ekonomi dan teknologi AS–Tiongkok, tetapi juga

memberikan kontribusi penting dalam memahami tantangan baru dalam sistem perdagangan dan diplomasi teknologi global yang semakin terpolarisasi.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang memuncak sejak 2020 telah membawa dampak signifikan terhadap Huawei, salah satu perusahaan teknologi terbesar asal Tiongkok. Perseteruan ini menciptakan dinamika baru dalam lanskap perdagangan internasional, di mana konflik antara dua kekuatan ekonomi dunia tidak lagi terbatas pada tarif atau ekspor-impor barang konsumsi, tetapi telah berkembang ke dalam arena persaingan teknologi dan supremasi digital. Tindakan Amerika Serikat terhadap Huawei, termasuk pembatasan akses perusahaan tersebut terhadap pasar global, kemitraan strategis, serta teknologi penting yang bersumber dari negara-negara Barat, menunjukkan bagaimana instrumen ekonomi digunakan untuk menghambat kemajuan perusahaan yang dianggap strategis bagi pesaing geopolitik, sekaligus memperkuat posisi dominan Amerika Serikat dalam industri teknologi global.

Dalam perspektif hubungan internasional, kebijakan tersebut tidak dapat dipisahkan dari strategi geopolitik Amerika Serikat dalam menghambat laju pertumbuhan teknologi tinggi Tiongkok. Huawei menjadi sasaran utama karena perannya yang krusial dalam pengembangan jaringan 5G dan ekosistem teknologi global. Sebagai bentuk perlawanan, Tiongkok meningkatkan kemandirian teknologinya dengan mendorong industrialisasi berbasis dalam negeri, memperkuat lini produksi Huawei, dan mencari alternatif kemitraan internasional yang tidak terpengaruh oleh kebijakan Amerika. Langkah-langkah ini memperlihatkan transformasi kebijakan industri Tiongkok yang kini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Huawei terhadap pasokan teknologi dari luar negeri, khususnya yang berasal dari Barat.

Secara global, ketegangan ini berdampak pada terganggunya aktivitas bisnis Huawei di berbagai negara, terutama dalam proyek-proyek pembangunan jaringan komunikasi yang melibatkan teknologi dan perangkat Huawei. Perusahaan-perusahaan multinasional, baik di Asia maupun Eropa,

terdampak secara langsung akibat pembatasan kerja sama yang menghambat akses terhadap produk dan layanan Huawei yang sebelumnya terintegrasi dalam proyek digital global. Situasi ini mendorong perusahaan untuk melakukan reorientasi strategi, membentuk kemitraan baru, dan mempercepat diversifikasi vendor teknologi untuk menjaga keberlanjutan operasional mereka. Akibatnya, pasar global menghadapi tekanan tidak hanya dari sisi pasokan dan produksi, tetapi juga dari ketidakpastian yang timbul akibat ketegangan politik yang menyelimuti kerja sama teknologi internasional.

Negara-negara yang berada dalam posisi strategis di antara dua kekuatan besar ini juga menghadapi tantangan tersendiri. Sebagai contoh, negara berkembang yang mengandalkan infrastruktur digital dan investasi teknologi dari kedua pihak menghadapi dilema dalam menentukan arah kerja sama di tengah tekanan politik global terkait penggunaan teknologi Huawei. Ketegangan ini turut mengubah pola relasi diplomatik dan memperlihatkan bagaimana kebijakan terhadap satu perusahaan dapat menjadi sumber tekanan politik yang memengaruhi keseimbangan hubungan internasional.

Dari sisi hukum internasional, tindakan sepihak yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Huawei menimbulkan polemik mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas dan adil sebagaimana diatur dalam sistem multilateral seperti WTO. Alasan keamanan nasional yang digunakan sebagai dasar kebijakan tersebut sering kali dipertanyakan oleh negara lain, yang menilai bahwa dalih tersebut sarat dengan kepentingan politik dan upaya menjaga dominasi pasar. Dengan demikian, konflik dagang yang melibatkan Huawei menunjukkan gejala pergeseran norma global dalam pengelolaan perdagangan teknologi, yang kini semakin dikaitkan dengan isu strategis dan pertahanan nasional.

Dari sisi ekonomi global, pembatasan akses Huawei terhadap teknologi dan pasar internasional telah menciptakan disrupsi signifikan dalam hubungan dagang dan kerja sama bisnis global. Ketergantungan banyak negara terhadap infrastruktur dan layanan teknologi Huawei menyebabkan tekanan besar terhadap kelangsungan proyek digital dan stabilitas investasi. Perusahaan-perusahaan multinasional menghadapi tantangan berupa ketidakpastian

operasional, peningkatan biaya integrasi teknologi alternatif, serta risiko fragmentasi pasar. Konflik ini juga mendorong terjadinya relokasi kerja sama dan investasi, karena pelaku industri mulai menghindari ketergantungan terhadap satu sumber teknologi yang rentan terhadap tekanan politik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam kasus Huawei tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga mengganggu stabilitas tatanan ekonomi global yang sebelumnya mengandalkan prinsip integrasi dan efisiensi lintas negara.

Dari sisi geopolitik, tekanan terhadap Huawei merefleksikan upaya strategis Amerika Serikat untuk mempertahankan pengaruhnya dalam tatanan dunia internasional melalui kontrol atas arsitektur teknologi global. Langkah-langkah pembatasan terhadap Huawei menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidak lagi bersifat teknokratis semata, tetapi telah menjadi alat dalam perebutan kekuasaan dan pengaruh global. Amerika Serikat secara aktif mengangkat isu keamanan nasional untuk membentuk koalisi politik, mendorong sekutu-sekutunya seperti Inggris, Australia, dan Jepang untuk membatasi keterlibatan Huawei dalam proyek infrastruktur digital. Di sisi lain, Tiongkok memandang tindakan ini sebagai bentuk containment terhadap kemajuan teknologinya. Rivalitas ini memperuncing ketegangan ideologis antara pendekatan liberal Barat dan model otoritarian Tiongkok dalam tata kelola digital dan kebijakan luar negeri. Negara-negara berkembang pun turut terdampak secara diplomatik karena harus berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan teknologi agar tidak terjebak dalam konflik antara dua kekuatan besar tersebut.

Dari sisi teknologi, dampak perang dagang terhadap Huawei telah mempercepat perubahan dalam arsitektur teknologi global. Pembatasan akses terhadap teknologi dari luar mendorong Huawei untuk mempercepat pengembangan ekosistem teknologinya sendiri, termasuk dalam bidang jaringan 5G, kecerdasan buatan (AI), dan infrastruktur digital lainnya. Ketegangan ini menciptakan efek domino dalam strategi pengembangan teknologi di berbagai negara, yang kini terpaksa menyesuaikan kebijakan dan arah inovasinya agar tidak bergantung pada satu blok kekuatan. Di sisi lain, Tiongkok meningkatkan dukungannya terhadap Huawei melalui program

industrialisasi dan investasi R&D untuk memperkuat posisi perusahaan tersebut sebagai simbol kemandirian teknologi nasional. Ketegangan ini membentuk dinamika baru dalam kompetisi inovasi global, yang tidak hanya menyangkut soal kapabilitas teknis, tetapi juga perebutan standar teknologi masa depan. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menciptakan dua sistem teknologi global yang terfragmentasi, dengan implikasi besar terhadap interoperabilitas, keamanan siber, dan tata kelola digital lintas negara.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada tiga aspek strategis yang perlu dianalisis secara mendalam. Pertama, bagaimana pembatasan terhadap Huawei memberikan tekanan terhadap struktur rantai pasok dan kerja sama teknologi global yang selama ini sangat bergantung pada integrasi komponen lintas negara. Kedua, bagaimana pembatasan ini memengaruhi posisi Huawei sebagai pemain utama dalam jaringan nilai global, serta langkah-langkah strategis yang diambil untuk memperkuat ketahanan teknologinya. Ketiga, bagaimana negara-negara lain, khususnya negara berkembang, memosisikan diri dalam menghadapi tarik-menarik kepentingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, baik dari sisi diplomasi teknologi maupun strategi adaptasi industri domestik.

Ke empat fokus tersebut dianggap relevan karena mencerminkan perubahan besar dalam peta kekuatan ekonomi global, serta memperlihatkan interaksi antara Hukum internasional, kebijakan ekonomi, teknologi, dan geopolitik yang saling memengaruhi. Periode 2020–2024 menjadi kerangka waktu yang ideal karena mencakup fase krusial ketika kebijakan sanksi dan pembatasan mulai diterapkan secara intensif dan menimbulkan berbagai respons dari aktor global. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi kajian hubungan internasional dan ekonomi global, serta memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dinamika perdagangan teknologi dalam era multipolar.

Berdasarkan fokus permasalahan tersebut, maka pertanyaan pokok yang menjadi dasar analisis adalah:

**:“Bagaimana dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap Huawei memengaruhi posisi perusahaan tersebut dalam sistem teknologi global pada periode 2020–2024?”**

Untuk mengarahkan penelitian secara lebih terfokus, pertanyaan pokok tersebut dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan operasional sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dan tindakan Amerika Serikat dalam konteks perang dagang memengaruhi operasional dan ekspansi global Huawei selama periode 2020–2024?
2. Bagaimana dampak tekanan geopolitik terhadap posisi Huawei dalam jaringan kerja sama internasional, khususnya dalam sektor infrastruktur digital dan teknologi tinggi?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok berdampak terhadap Huawei selama periode 2020–2024. Fokus penelitian diarahkan pada pengaruh kebijakan dan tindakan pembatasan terhadap operasional dan ekspansi global Huawei, serta dampaknya terhadap keberlanjutan kerja sama teknologi dan stabilitas rantai pasok global di sektor digital. Melalui studi ini, penulis juga berupaya menjelaskan bagaimana dinamika perdagangan teknologi digunakan sebagai instrumen geopolitik dalam mempertahankan dominasi kekuatan global, serta menelaah implikasi jangka panjang dari ketegangan perdagangan antara dua negara adidaya tersebut terhadap struktur dan arah tatanan ekonomi global yang semakin kompleks dan terintegrasi.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam kajian hubungan internasional dan ekonomi politik global, khususnya dalam memahami bagaimana perang dagang antara AS dan



Tiongkok pada periode 2020-2024 memengaruhi dinamika kebijakan ekonomi dan perdagangan sebagai instrumen strategis dalam persaingan kekuatan besar dunia. Penelitian ini juga akan memperkaya literatur tentang dampak konflik dagang besar terhadap perdagangan internasional, termasuk bagaimana sanksi dan tarif mempengaruhi rantai pasok global dan hubungan bilateral kedua negara.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat umum dalam memahami konsekuensi ekonomi dan politik dari perang dagang AS-Tiongkok selama periode tersebut. Penelitian ini diharapkan membantu pemerintah dan sektor swasta dalam merumuskan strategi adaptasi yang efektif untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi yang muncul akibat konflik perdagangan tersebut. Selain itu, temuan penelitian ini relevan bagi pembuat kebijakan global dalam merancang kebijakan teknologi dan perdagangan internasional yang responsif terhadap tantangan polarisasi teknologi dan ekonomi yang dipicu oleh perang dagang AS-Tiongkok.

## **1.5 SISTEMATIS PENULISAN**

- 1) **BAB I – PENDAHULUAN** Pada bab ini dijelaskan mengenai struktur awal penelitian yang memuat latar belakang masalah yang menjelaskan awal mula peristiwa ini terjadi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar untuk memahami urgensi dan arah dari penelitian yang dilakukan.
- 2) **BAB II – TINJAUAN PUSTAKA** Bab ini memuat tentang penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembanding dan rujukan, serta berisi mengenai konsp dan teori yang relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Selain itu, disajikan pula kerangka pemikiran sebagai acuan analisis.
- 3) **BAB III – METODOLOGI PENELITIAN** Dalam bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, berita dan artikel yang relevan.

- 4) BAB IV – DINAMIKA KONFLIK AMERIKA SERIKAT–TIONGKOK Bab ini membahas dinamika perang dagang Amerika Serikat–Tiongkok periode 2020–2024 dengan fokus pada kebijakan proteksionisme terhadap Huawei dan dampaknya terhadap rantai pasok teknologi global. Analisis dilakukan berdasarkan teori hegemoni dan konstruktivisme yang telah dijelaskan sebelumnya untuk melihat hubungan antara kebijakan, geopolitik, dan perubahan struktur industri teknologi.
- 5) BAB V – PENUTUP Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah. Selain itu, disampaikan saran yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai masukan akademik dan praktis

